PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan

Negara Indonesia dikenal di mata dunia karena kekayaan keberagamannya. Keberagaman bangsa Indonesia meliputi kekayaan akan bahasa, suku, agama, golongan, ras, dan tradisi atau adat-istiadat yang berasal dari berbagai macam daerah. Indonesia mempunyai lebih dari 17.000 pulau, 1.300 suku bangsa, dan lebih dari 700 bahasa daerah. Kekayaan tersebut menyebabkan Indonesia memiliki warisan budaya yang unik dan beragam. Setiap suku dan daerah memiliki ciri khas, adat dan tradisi yang unik yang mencerminkan nilai-nilai luhur, penghormatan kepada leluhur, dan kebersamaan masyarakat setempat.¹

Kekayaan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia diwariskan dari para leluhur. Kekayaan budaya itu menjadi warisan berharga yang harus dijaga dan dilestarikan karena menjadi identitas khas bangsa Indonesia. Budaya tradisional lahir dan berkembang melalui kegiatan dan kreativitas masyarakat yang menempati setiap wilayah di Indonesia dengan fitur khas tertentu yang mencerminkan diri dalam tradisi-tradisi lokal yang beragam. Hal tersebut menciptakan panorama kekayaan budaya yang memperkaya identitas bangsa Indonesia.²

Identitas Masyarakat dibentuk dari budaya yang memengaruhi cara berinteraksi, berpikir, dan kebiasaan hidup sehari-hari. Kebudayaan dan masyarakat merupakan dua realitas sosial yang saling terkait erat tetapi berbeda; keberadaan yang satu mengandaikan keberadaan yang lainnya. Tidak ada masyarakat tanpa kebudayaan, begitu pula sebaliknya. Meskipun sering kali disamakan dalam kehidupan sehari-hari, keduanya memiliki perbedaan mendasar. Kebudayaan berkaitan dengan sistem norma dan nilai, sementara masyarakat merujuk pada

¹La Ode M. I. Hamid, Z. Zuriyati, dan I. Iskandar, “Systemic Literature Review: Makna Budaya di Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7:3 (2023), hlm. 29219; Pemerintah Kabupaten Buleleng, “Keanekaragaman Budaya Indonesia: Warisan yang Harus dijaga”, https://gerakgak.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/73_keanekaragaman-budaya-indonesia-warisan-yang-harus-dijaga, diakses pada 31 Maret 2025.

²Indriafitri Kusumawati, “Tradisi Ngeleluri Omyaking Warga Hametri Kuncara Desa Ngrowthod sebagai Daya Tarik Wisata di Desa Girikerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman” (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, 2012), hlm. 1.

kelompok manusia.³ Kebudayaan merupakan sistem norma dan nilai yang dianut suatu masyarakat, sedangkan masyarakat adalah kumpulan individu yang berinteraksi dan mengamalkan norma, nilai, dan adat istiadat yang terkandung dalam kebudayaan tersebut. Manusia, sebagai makhluk sosial, tak terpisahkan dari aturan dan hukum budaya serta adat istiadat yang berlaku di wilayah tertentu.⁴

Kata budaya atau kebudayaan secara etimologis berasal dari kata Bahasa Sanskerta, yakni *buddayah* yang merupakan bentuk jamak dari kata *buddhi* yang berarti budi atau akal. Budaya didefinisikan sebagai budi daya. Arti tersebut mengandung makna pemberdayaan budi dalam bentuk cipta, karsa, dan rasa; sementara kebudayaan merupakan hasil manifestasi dari cipta, karsa, dan rasa tersebut. Kata *culture* dalam Bahasa Inggris berasal dari kata Bahasa Latin, yakni *colere* yang berarti mengolah atau mengerjakan atau tindakan mengolah tanah atau bertani. Hal yang perlu diingat adalah kata *culture* kadang kali diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai kultur yang merujuk pada usaha untuk memelihara dan mengembangkan budi, akal, dan jiwa.⁵

Budaya adalah suatu adat atau kebiasaan masyarakat terkait prinsip atau tata cara hidup tertentu yang bertumbuh, berkembang, dan diwariskan oleh para leluhur. Kebudayaan itu sendiri melingkupi segala tingkah laku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh secara turun-temurun. Contohnya adalah tata cara makan, sopan santun, upacara adat perkawinan, hingga cara memilih pemimpin. Dengan demikian, budaya dapat dipahami sebagai seperangkat norma, nilai, kepercayaan, adat istiadat, bahasa, seni, teknologi, dan cara hidup yang dihidupi, dikembangkan, dihayati, serta diwariskan oleh suatu kelompok manusia. Dengan kata lain, budaya mencakupi segala aspek kehidupan manusia yang mencerminkan identitas, keyakinan, serta berbagai praktik yang diwariskan turun-temurun.⁶

³Wayan Mudana dan Nengah Bawa Atmadja, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 12.

⁴Bernard Raho, *Sosiologi* (Maumere: Ledalero, 2016), hlm. 123.

⁵*Ibid.*, hlm. 4.

⁶Rahma Ito Siagian, "Peran Guru Pendidikan Agama dalam Penerapan Pendidikan Multikultural di SMP Swasta Sariputra Padangsidempuan" (Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2021), hlm. 1; Hasanuddin Manurung dan Yohanes Kristian Labobar, "Implementasi Budaya *Duan Lolat* sebagai *Civic Culture* dalam Perkawinan untuk Memperkokoh Hubungan Kekerabatan (Studi Kasus Budaya *Duan Lolat* di Desa Waturu)", *CESSJ: Civics Education and Socil Sciense Journal*, 4:1 (Juni, 2022) hlm. 2.

Salah satu unsur penting dari budaya adalah tradisi atau adat istiadat. Masyarakat Indonesia meyakini adat istiadat sebagai warisan leluhur yang tak boleh diabaikan atau ditinggalkan. Adat istiadat merupakan norma dan aturan yang mengatur hubungan manusia dengan sesama, alam, Tuhan, dan arwah para leluhur.⁷ Adat istiadat pada umumnya dimaknai sebagai kebiasaan turun-temurun yang dilakukan dan diikuti oleh masyarakat dalam jangka waktu panjang, sehingga menjadi tradisi dan ciri khas suatu daerah atau kelompok masyarakat tertentu. Adat istiadat umumnya berfungsi untuk mengatur perilaku dan sikap atau relasi sosial masyarakat. Setiap orang tidak dapat bebas dari adat istiadat yang dibentuk dan belaku berdasarkan kesatuan keturunan darah, proses atau kerja, dan geografis.⁸

Jalanan kasih sayang antara pria dan wanita dalam masyarakat tidak hanya tumbuh secara alami, tetapi juga ditata dan diatur melalui seperangkat norma dan kebiasaan yang dikenal sebagai aturan perkawinan. Aturan itu menjadi kerangka sosial yang membimbing proses pembentukan keluarga secara resmi dan diakui oleh komunitas. Dengan demikian, ikatan cinta tidak hanya menjadi urusan pribadi, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan kultural yang kuat. Perkawinan bukan hanya menyangkut hubungan antara dua individu, tetapi juga menjadi pengikat antara kedua keluarga besar yang terlibat, mempererat hubungan kekerabatan dan kehormatan keluarga sebagai bentuk kesatuan sosial yang penting.⁹

Tata cara perkawinan merupakan bagian tak terpisahkan dari kekayaan budaya suatu masyarakat. Di dalamnya, tercermin nilai-nilai luhur, tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi, serta pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat setempat. Setiap tahapan dalam proses perkawinan, mulai dari pendekatan hingga upacara pernikahan, sarat akan simbolisme dan makna mendalam yang merefleksikan identitas dan karakteristik unik dari budaya tersebut. Aturan perkawinan bukan sekadar formalitas belaka, melainkan representasi konkret dari sistem nilai dan tradisi yang dijunjung tinggi oleh suatu komunitas. Memahami dan menghormati tata cara perkawinan berarti pula menghargai dan

⁷Stefanus Ozias Fernandes, *Humanisme (Citra Manusia Budaya Timur dan Barat)* (Ende: Penerbit Arnoldus, 1983), hlm. 288.

⁸Yosef Suban Hayon, "Pelayanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur", *Jurnal Ledalero*, 5:1 (Juni 2006), hlm. 55.

⁹Abd. Kadir Ahmad, *Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat* (Makassar: Indobis Publishing, 2006), hlm. ix-x.

melestarikan warisan budaya yang membentuk identitas suatu masyarakat. Perkawinan menjadi jembatan yang menghubungkan individu dengan akar budaya mereka.¹⁰

Tata cara perkawinan merupakan salah satu bagian penting dari budaya yang mencerminkan nilai-nilai dan tradisi masyarakat setempat. Hampir semua suku di Indonesia memiliki suatu tata cara atau kebiasaan yang mengatur kehidupan bersama dan relasi sosial antara anggota masyarakat yang diperoleh dari budaya dan semuanya telah tersusun dalam kehidupan masyarakat, termasuk tata cara perkawinan. Setiap suku memiliki adat perkawinan yang unik dengan rangkaian prosesi dan makna simbolis yang berbeda-beda.

Kabupaten Kepulauan Tanimbar adalah salah satu wilayah di Maluku yang memiliki budaya dan adat istiadat yang unik. Keunikan budaya Kabupaten Kepulauan Tanimbar tercermin dalam tradisi atau adat istiadatnya. Kabupaten Kepulauan Tanimbar memiliki tradisi *Duan Lolat*. Tradisi *Duan Lolat* itu juga tercermin dalam adat perkawinan mereka. Ikatan perkawinan adat mereka menekankan peran dan relasi antara *Duan* dan *Lolat*. *Duan* adalah pihak pemberi anak dara dan *Lolat* adalah pihak penerima anak dara. Filosofi *Duan Lolat* menekankan hubungan lahir-batin, persatuan kedua keluarga, dan keluhuran martabat perkawinan yang harus dijaga yang disimbolkan dengan istilah, seperti *lere-bulan* (matahari-bulan) yang melambangkan sikap saling melengkapi pria dan wanita. Perkawinan itu bukan hanya urusan pribadi kedua pasangan, tapi juga urusan adat, keluarga, masyarakat, dan keagamaan dalam masyarakat Tanimbar. Perkawinan dianggap sah melalui metode perjodohan, suka sama suka, atau kawin lari, dengan pengesahan oleh penghulu adat yang disimbolkan dengan pemegangan tangan kedua mempelai. Hal tersebut menjadi keunikan dari perkawinan adat dalam masyarakat suku Tanimbar.¹¹

¹⁰Bayu Sudrajat, "Hajatan Pernikahan: Dari Nilai-nilai Tradisi dan Dampak Ekonominya", *AT-THARIQ: Jurnal Studi Islam dan Budaya*, 3:2 (Agustus 2023), hlm. 13; Resi A. Supit, "Nilai-nilai Islami dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Lampung Saibatin (Pekon Kerbang Dalam Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat)" (Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2021), hlm. 66.

¹¹Yonas Fenanlampir dan Fransiskus Kandunmas, "Keabsahan Perkawinan Adat *Duan Lolat* di Tanimbar dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional (Suatu Kajian Yuridis tentang Keabsahan Perkawinan Adat *Duan Lolat* Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan)", *Jurnal Cahaya Mandalika*, 5:2 (2024), hlm. 524.

Dalam kehidupan bermasyarakat, tata cara perkawinan tidak hanya diatur oleh norma-norma adat yang berlaku secara turun-temurun. Selain pranata adat yang memiliki mekanisme dan tahapan tersendiri dalam mengelola proses pernikahan, keberadaan lembaga keagamaan juga memberikan dimensi lain dalam pengaturan ikatan suci ini. Lembaga-lembaga keagamaan sering kali memiliki pandangan dan aturan spesifik terkait dengan perkawinan yang bersumber dari ajaran dan keyakinan yang dianut.¹² Keberadaan aturan perkawinan yang bersumber dari ajaran agama menunjukkan bahwa perkawinan memiliki dimensi spiritual dan keagamaan yang penting bagi sebagian masyarakat. Aturan-aturan itu tidak hanya mengatur aspek formalitas pernikahan, tetapi juga memberikan kerangka nilai dan moral yang diyakini akan membimbing kehidupan pasangan dalam mencapai kebahagiaan dan keberkahan sesuai dengan keyakinan agama mereka.¹³

Salah satu contoh konkret dari peran lembaga keagamaan dalam mengatur perkawinan adalah Gereja Katolik. Tata cara perkawinan dalam Gereja Katolik diatur secara khusus berdasarkan prinsip-prinsip iman Kristiani. Dalam tradisi Katolik, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai sebuah kesepakatan sosial antara dua individu, tetapi juga sebagai sakramen suci yang memiliki makna teologis mendalam. Gereja Katolik menekankan pernikahan sebagai ikatan sakral dan kekal antara seorang pria dan wanita. Sakramen ini mengangkat kasih suami-istri ke dalam kasih ilahi, di mana suami dan istri menjadi tanda rahmat kehadiran Tuhan bagi satu sama lain.¹⁴ Prinsip-prinsip iman Kristiani tersebut kemudian diimplementasikan dalam berbagai aspek perkawinan Katolik; mulai dari persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai, tata cara pemberkatan pernikahan di Gereja, hingga pemahaman tentang hak dan kewajiban suami-istri dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan sesuai dengan ajaran Gereja. Dengan demikian, perkawinan dalam Gereja Katolik memiliki kekhasan yang

¹²Mesta W. Nita, *Hukum Pernikahan Indonesia* (Lampung: CV. Laduny Alifatama, 2021), hlm. 28-29.

¹³Benedictus Julian Thomas, “Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional”, *Jurnal Kewarganegaraan*, 7:2 (Desember 2023), hlm. 2223.

¹⁴C. Groenen, *Perkawinan Sakramental* (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 368.

membedakannya dari perkawinan yang hanya didasarkan pada hukum adat atau hukum sipil semata.

Meskipun ada perbedaan mendasar antara perkawinan adat *Duan Lolat* dan perkawinan Gereja Katolik, keduanya mempunyai peran dan hubungan yang penting dalam menata kehidupan pasangan suami-istri. Keduanya berfungsi sebagai kerangka acuan yang membimbing interaksi dan tanggung jawab dalam ikatan pernikahan. Keduanya hadir sebagai pedoman yang memberikan struktur dan makna bagi hubungan pernikahan dalam masyarakat. Penulis tertarik untuk menggali lebih dalam makna perkawinan adat *Duan Lolat* dan melihat relevansinya terhadap perkawinan dalam Gereja Katolik. Oleh karena itu, penulis merumuskan kajian ini dengan judul **MAKNA PERKAWINAN ADAT *DUAN LOLAT* DALAM MASYARAKAT SUKU TANIMBAR KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR DAN RELEVANSINYA TERHADAP PERKAWINAN DALAM GEREJA KATOLIK.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah utama dari tulisan ini adalah relevansi makna perkawinan adat *Duan Lolat* dalam masyarakat suku Tanimbar di Kabuapten Kepulauan Tanimbar terhadap perkawinan dalam Gereja Katolik? Rumusan masalah utama tersebut mempunyai beberapa masalah turunan. *Pertama*, bagaimana dan apa makna perkawinan adat *Duan Lolat* dalam masyarakat suku Tanimbar? *Kedua*, bagaimana perkawinan dalam Gereja Katolik?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulis membagi tujuan penulisan skripsi ini ke dalam dua bagian yaitu, tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Penulisan skripsi ini mempunyai beberapa tujuan. *Pertama*, untuk mengeksplorasi dan menjelaskan makna perkawinan adat *Duan Lolat* dalam masyarakat suku Tanimbar. *Kedua*, untuk menjelaskan dan memahami perkawinan dalam Gereja Katolik. *Ketiga*, untuk menjelaskan dan memahami relevansi makna

perkawinan adat *Duan Lolat* dalam masyarakat suku Tanimbar terhadap perkawinan dalam Gereja Katolik.

1.3.2 Tujuan Khusus

Karya tulis ini juga mempunyai arti penting bagi penulis sendiri, yakni memenuhi sebagian persyaratan akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Filsafat di Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero.

1.4 Metode Penulisan

Tulisan ini merupakan sebuah kajian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Penulis juga menggunakan teknik wawancara dalam mengumpulkan data atau informasi, terutama yang berkaitan dengan perkawinan adat *Duan Lolat*. Dengan metode kepustakaan, penulis mencari sumber-sumber di perpustakaan, seperti buku-buku, artikel-artikel jurnal, surat kabar, artikel internet, karya ilmiah, skripsi dan tesis yang membahas topik tentang Perkawinan adat *Duan Lolat* dan perkawinan menurut Gereja Katolik. Penulis juga akan mencari berbagai jurnal elektronik untuk mengumpulkan bahan-bahan yang berbicara mengenai judul skripsi ini. Sumber-sumber tersebut dijadikan sebagai landasan teoritis untuk memperkuat ide-ide dan gagasan-gagasan penulis dalam tulisan ini. Penulis juga mewawancarai beberapa informan kunci terkait perkawinan adat *Duan Lolat*, yakni ketua adat dan para orang tua suku Tanimbar, baik secara langsung maupun via telepon seluler.

1.5 Sistematika Penulisan

Karya tulis ini dirinci ke dalam lima bab. Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, makna penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi penjelasan tentang selang pandang masyarakat suku Tanimbar yang meliputi beberapa poin, yakni wilayah, asal-usul dan identitas, serta sistem kepercayaan masyarakat suku Tanimbar. Dalam bab ini penulis juga memperkenalkan sistem perkawinan adat masyarakat suku Tanimbar. Pembahasan tentang perkawinan adat menurut masyarakat Tanimbar meliputi model-model

perkawinan adat *Duan Lolat* sampai dengan tahap-tahap perkawinan adat *Duan Lolat* dalam masyarakat suku Tanimbar.

Bab III berisi uraian tentang perkawinan Gereja Katolik. Pada bab ini, penulis menjelaskan perkawinan menurut Kitab Suci, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, serta pandangan Kitab Hukum Kanonik (KHK), terutama berkaitan dengan hakikat, sifat-sifat, dan tujuan dari perkawinan.

Bab IV akan berbicara tentang makna perkawinan adat *Duan Lolat* dalam masyarakat suku Tanimbar. Selain itu, penulis juga akan membahas relevansi perkawinan adat *Duan Lolat* dalam masyarakat suku Tanimbar terhadap perkawinan Gereja Katolik.

Bab V merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan umum dan usul-saran. Kesimpulan tersebut merupakan rangkuman singkat atas seluruh pembahasan dari bab-bab sebelumnya. Usul-saran dalam tulisan ini ditujukan kepada para orang tua, kaum muda mudi, pasangan suami istri, pemerintah, lembaga pendidikan, dan Gereja.